

ABSTRAK

Peristiwa bencana pada 28 September 2018 di Kota Palu dan Kabupaten Sigi menimbulkan banyak kerugian materiil dan imateriil untuk masyarakat. Masyarakat adat menilai bahwa dampak kerugian yang tidak maksimal diminimalisir ini terjadi akibat risiko bencana yang diabaikan. Padahal terdapat banyak pengetahuan lokal atau *tutura* yang memberikan gambaran mengenai risiko bencana dan upaya meminimalisirnya. Namun pemerintah terkesan melakukan pengabaian kembali ketika memutuskan kebijakan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tidak sensitif terhadap risiko bencana yang ada. Pengabaian ini menimbulkan perlawanan masyarakat adat terhadap proyek pembangunan pasca bencana. Namun pemerintah menanggapi upaya perlawanan ini dengan wacana pendiskreditan pengetahuan lokal yang dibenturkan dengan ‘rasionalitas’ dari pengetahuan modern. Penelitian ini menggunakan konsepsi hegemoni dan *counter-hegemony* milik Antonio Gramsci (1971). Penulis akan melihat bagaimana *counter-hegemony* yang dilakukan oleh intelektual organik di Kota Palu dan Kabupaten Sigi melalui dua strategi perlawanan, *war of position* dan *war of manoeuvre*. Sebelumnya penulis mendeteksi hegemoni yang dibangun oleh pemerintah melalui perangkat-perangkat hegemoni budaya (kesenian, agama, pendidikan dan media) dan dominasi (kebijakan dan aparat penegak hukum) untuk memudahkan menggambarkan arena pertarungan pengetahuan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini juga menggunakan data primer dan sekunder (pelacakan dokumen) untuk memahami hegemoni pengetahuan modern dan *counter-hegemony* pengetahuan lokal yang terjadi. Adapun pemilihan informan dan artefak pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menemukan bahwa pertarungan pengetahuan yang terjadi tidak antagonistik antara pengetahuan modern melawan pengetahuan lokal. Pemerintah melakukan *cherry picking* pengetahuan modern yang dapat memelihara dan membentuk aktivitas produksi ekonomi. Masyarakat adat pun dalam melakukan *counter hegemony* menggunakan kedua pengetahuan untuk menarik basis massa, baik dari masyarakat maupun ‘pembajakan’ aparat pemerintahan.

Keyword: *pengetahuan lokal, hegemoni pengetahuan modern, perlawanan masyarakat adat, pengurangan risiko bencana*

ABSTRACT

On 28 September 2018, a devastating disaster strikes Palu City and Sigi regency. The disaster leaves a ravaging trail of destruction; causing many material and immaterial damages to the community. The indigenous people believe that the sheer causes of loss is because of the disaster risk that has been neglected. Despite having a lot of indigenous knowledge—known as *tutura*—which provides an overview of disaster risks and efforts to reduce them, the government seems to have ignored it when it comes to deciding on policies regarding the post-disaster rehabilitation and reconstruction phase. This ignorance has led the indigenous people to resist against the post-disaster reconstruction projects. However, the government responses to these resistances are discourse of discrediting indigeneous knowledge which contrasted with the ‘rationality’ of modern knowledge. This study uses Antonio Gramsci’s (1971) concepts of hegemony and counter-hegemony which examines how the counter-hegemony carried out by organic intellectuals in Palu City and Sigi Regency through two resistances strategies: the war of position and war of manoeuvre. In order to facilitate the depiction of the arena of knowledge battle that occurred, first, the study will analyze the hegemony that arises by the government through cultural hegemony tools (such as arts, religion, education, and media) and domination (policies and law enforcement officials). This research study used qualitative method which involves a case study approach. This research requires primary and secondary data (document tracking) in order to understand the modern knowledge hegemony and the counter-hegemony of indigeneous knowledge that occurs. This study used purposive sampling in selecting informants and artifacts. Furthermore, this research finds out that the knowledge battle that occurs between modern knowledge and indigeneous knowledge is not antagonistic. The hegemonic performs cherry-picking modern knowledge which can maintain and shape economic production activities. Additionally, in conducting cultural counter hegemony, Indigenous people use both knowledge to attract the mass base, both from society and influence several government officials.

Keywords: indigeneous knowledge, modern knowledge hegemony, indigenous people resistance, disaster risk reduction